



**PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heli Restiati
Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sally Salamah
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Pihak Pertama,

Heli Restiati
NIP. 19680512 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	
			Satuan	Jumlah
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik 1.2 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah Persen	5 8
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik 2.2 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah Jumlah	8 17
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1 Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	5
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	4.1 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persen	32
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	5.1 Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Persen	28
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1 Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	Persen	19,44
		6.2 Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	11,11
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	Indeks Skala 100	75

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan Direktorat	Rp. 1.243.620.000,00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp. 1.375.000.000,00
Jumlah	Rp. 2.618.620.000,00

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Deputi Kepala BPKP
Bidang Akuntan Negara

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Direktur,

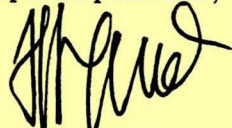
Heli Restiati
NIP. 19680512 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

NO	KODE TOPIK	SEKTOR/TEMA/TOPIK PENGAWASAN	PERAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola Penyaluran Bantuan Sosial Beras (a.l. meliputi penyediaan, pendistribusian, dsb) - Ketepatan sasaran (di salurkan kepada KPM sesuai data penerima bantuan), jumlah (jumlah beras yang dibayarkan sesuai jumlah dalam surat perintah), dan waktu penyaluran (waktu penyaluran tidak melebihi yang diatur dalam PKS) - Permasalahan dan hambatan penyaluran terkait BULOG - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 	-	√	-	-
2	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan perencanaan pembangunan jalan tol - Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan tol, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi - Utilisasi infrastruktur jalan tol sesuai peruntukan - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan - Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi 	-	-	-	√
3	C.4.a.	BUMN	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Governance, Risk and Control BUMN - Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal BUMN - Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi dan transparansi BUMN pada industri masing-masing - Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja pelaksanaan penugasan pemerintah) - Peran BUMN pada kontribusi fiskal negara/daerah - Analisis going concern BUMN - Indikasi fraud di BUMN - Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset - Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanaan bisnis - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 	-	-	√	-
4	D.6.a.	Transformasi Energi Baru Terbarukan	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program - Akuntabilitas pelaksanaan program, termasuk potensi inefisiensi belanja - Risiko yang belum termitigasi - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 	√	-	-	-

NO	KODE TOPIK	SEKTOR/TEMA/TOPIK PENGAWASAN	PERAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
5	E.4.a.	Food Estate	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis ketepatan kebijakan pengembangan food estate (on-farm dan off-farm), serta keselarasan antar K/L dan Pemda - Kualitas tata kelola lahan pangan untuk food estate (terkait dengan status lahan, pembagian lahan, dst) - Keselarasan kegiatan food estate dengan kegiatan dukungan (Irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.) - Progres penyelesaian pembangunan food estate - Pencapaian target produksi dan produktivitas pangan di kawasan food estate - Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah hasil produksi, distribusi dan pemasaran berbasis digital - Efektivitas Korporasi petani (berdaya guna untuk meingkatkan kesejahteraan petani) - Hambatan dan permasalahan pelaksanaan food estate - Risiko pelaksanaan food estate yang belum termitigasi - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan food estate - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi food estate 	-	-	√	-
6	E.5.a.	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat atas 11 bahan pangan pokok (seluruh K/L terkait) - Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi) (Bulog) - Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas (Bulog) - Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program (Seluruh K/L dan Bulog) - Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program (Seluruh K/L dan Bulog) - Risiko yang belum termitigasi (Seluruh K/L dan Bulog) - Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi (Seluruh K/L dan Bulog) 	-	-	√	-

Deputi Kepala BPKP,



Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Direktur,



Heli Restiati
NIP. 19680512 198903 2 001